

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	25
A. Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia.....	25
1. Negara Hukum dan Kebijakan Politik Hukum di Indonesia.....	25
2. Penerapan Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC).....	40
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	50
BAB III IMPLIKASI KEBIJAKAN <i>CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY</i> (CBDC) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN	53
A. Proses Inisiasi Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) oleh Bank Indonesia.....	53
1. Dasar Pembentukan Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC).....	53
2. Konfigurasi Desain Rupiah Digital.....	59

B. Implikasi Hukum Terhadap Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.....	69
BAB IV PENERAPAN KEBIJAKAN <i>CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY</i> (CBDC) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM DI INDONESIA	78
A. Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) ditinjau dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia.....	78
B. Keselarasan Kebijakan <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan Politik Hukum di Indonesia.....	87
BAB V PENUTUP	94
A. SIMPULAN.....	94
B. SARAN.....	95
PUSTAKA ACUAN	97